

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK  
PENGHASILAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA UMKM PLASTIK SERUNI  
STAR KOTA BATU**

**SKRIPSI**



**NORBERTUS ADRIANUS MALI**

**NIM: 2015110074**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Penataan biaya ialah suatu tindakan menghemat angsuran pengeluaran dalam jumlah yang dapat diabaikan namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu dapat menempuh berbagai cara untuk membatasi tarif pajak yang tetap dalam kaitannya dengan pengaturan beban melalui pajak. Tujuan riset ini sebagai menganalisis penerapan merencanakan pajak mengupayakan penghematan pajak penghasilan di masa pandemi covid-19 pada UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu. Riset yang dilaksanakan ialah kualitatif deskriptif. Memakai data laporan keuangan UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu tahun 2017-2020. Untuk mengumpulkan data ialah berupa mendokumentasikan. Sebagai menganalisa data yang ialah memakai deskriptif sebagaimana memaparkan laporan keuangan yang didapat. Dari hasil riset memaparkan bahwasannya saya UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu sudah menerapkan perencanaan pajak secara legal sehingga mampu menghemat jumlah pembayaran pajak penghasilan menjadi rendah dan stabil setiap tahun walaupun terjadi peningkatan penjualan. Penerapan perencanaan pajak yang diterapkan UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu di masa pandemi yaitu melaporkan peredaran bruto sebesar Rp.20.000.000/ bulan sehingga kena tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dan menyetorkan jumlah pajak terutang sebesar Rp100.000/ bulan atau sebesar Rp.1.200.000/ tahun. Rencana pajak dilakukan untuk memenuhi komitmen biaya dan sesuai pengaturan peraturan dan pedoman tugas yang sesuai sehingga otorisasi peraturan dan sah tidak akan dipaksakan.

***Kata kunci: Pajak Penghasilan, Pandemi, Perencanaan Pajak, UMKM, Wajib Pajak Badan***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak bagi badan publik ialah jenis penerimaan yang digunakan untuk mendanai konsumsi negara, baik penggunaan rutin maupun penggunaan perbaikan. Namun bagi UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu, pungutan ialah beban atau beban yang akan mengurangi keuntungan bersih. Dengan asumsi keuntungan diperoleh oleh UMKM Seruni Star Plastik Kota Batu Besar, maka setoran tahunan yang disetorkan ke kas negara juga besar. Melihat kekhasan tersebut, maka UMKM Seruni Star Plastik di Kota Batu berupaya untuk memiliki opsi untuk melakukan pembebanan dana cadangan atau pengurangan secara sah (masih dalam sistem pengaturan penilaian). UMKM Seruni Bintang Kota Batu dapat menempuh berbagai cara untuk membatasi tarif pajak yang tetap dalam kaitannya dengan pengaturan beban melalui pengaturan biaya.

Rencana pajak atau ialah tahap dasar untuk melakukan penelitian metodis terhadap obat-obatan biaya lain yang ditentukan untuk mencapai kepuasan komitmen tugas terkecil. Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang ekstrim, membuat pemilik elemen bisnis melakukan pengaturan beban, bisnisnya diharapkan dapat mendominasi apa yang terjadi dalam jangkauan, sebenarnya. Baik keadaan dalam maupun luar, sehingga pengaturan bea dapat dilakukan dengan tepat dan lengkap pada bursa yang mempengaruhi pemungutan pajak. UMKM Plastik Seruni Star di Kota Batu ialah diantara UMKM yang mengalami ekspansi kritis dalam pembayaran secara konsisten. Bayaran/manfaat yang diperoleh UMKM Seruni Star di Kota Batu tentunya sudah menjadi objek ketetapan pajak.

Laba ialah sudut pandang yang signifikan bagi UMKM untuk ditarik untuk mengikuti kesesuaian bisnis. Dengan tujuan agar UMKM terus berupaya meningkatkan keuntungan secara

praktis. Semakin menonjol manfaat yang diperoleh UMKM Plastik Seruni Star di Kota Batu, maka semakin menonjol pula penilaian yang ditanggung oleh UMKM tersebut. Selanjutnya, UMKM Plastik Bintang Seruni Kota Batu harus membayar bea masuk yang sangat besar yang ditunjukkan dengan besarnya gaji kotor yang didapat. UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu membayar penilaian tahunan setiap tahun yang umumnya dibangun, ini sebenarnya dapat dibatasi melalui rencana pajak dengan beberapa teknik yang mengacu pada Peraturan Pengeluaran Pribadi no. 36 tahun 2008.

Ketika tugas daerah pemungutan pajak dalam mendukung pendapatan negara, diperlukan kesadaran semua lapisan masyarakat tentang pentingnya tugas bagi keberadaan negara dan negara untuk organisasi atau substansi bisnis. Bagi Express besarnya bea masuk, kondisi moneter negara akan lebih baik. Bagi warga negara, membayar bea benar-benar ialah beban, yang berarti semakin sedikit pengeluaran yang dibayarkan, semakin produktif. Untuk unsur bisnis, beban ialah bobot yang akan mengurangi total kompensasi. Kontras di bidang pemungutan pajak pada umumnya terjadi di antara organisasi dan otoritas publik karena perbedaan kepentingan, yang pada dasarnya organisasi perlu membayar bea sesedikit mungkin sementara otoritas publik sebanyak yang dapat diharapkan secara wajar.

Dengan pengaturan bea yang besar, kita dapat membayar beban dengan baik karena pada umumnya pengaturan beban biasanya dimulai dengan memastikan apakah suatu pertukaran atau kekhususan dibebani, apakah cenderung diusahakan untuk menghalangi atau mengurangi berapa bea, kemudian apakah angsuran biaya yang dimaksud dapat ditanggihkan, dll. Sistem yang biasanya diselesaikan oleh organisasi ialah dengan mengarahkan angsuran pengeluaran atau membatasi komitmen biaya sesuai dengan peraturan dan pedoman biaya dengan memanfaatkan kekurangan yang ada dalam undang-undang (klausul pelarian) dengan tidak mengabaikan

pengaturan biaya. peraturan yang sebenarnya mengingat alasan pengaturan tarif ialah untuk ada penghematan biaya dan penghindaran bea sehingga tempat tarif perpajakan, baik biaya tahunan maupun bea yang berbeda, berada pada posisi yang paling dapat diabaikan.

Suandy (2011: 1), terdapat perbedaan kepentingan dalam hal pungutan antara otoritas publik dan warga negara mengingat membayar biaya berarti mengurangi batas keuangan warga negara, sedangkan pungutan ialah diantara mata air utama dari pembayaran negara yang digunakan. untuk mendanai latihan negara. Organisasi sebagai warga negara harus mematuhi dan melakukan komitmen pengeluaran mereka sesuai dengan pedoman yang sesuai. Mengingat penelitian sebelumnya yang diarahkan oleh Novayanti (2012) menyatakan bahwasannya semakin penting manfaat yang diperoleh, semakin menonjol berapa penilaian yang harus dibayarkan. Hal ini membuat organisasi mengajukan upaya yang berbeda untuk menghemat biaya sejauh tarif perpajakan.

Upaya untuk menghemat tarif perpajakan harus dimungkinkan secara sah atau salah. Diantara cara halal yang dapat dilakukan warga negara ialah melalui pengaturan retribusi tanpa mengabaikan pedoman yang tepat dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan sah yang ada. Diantara rencana pengeluaran ini ialah mengantisipasi perlakuan Pasal 21 Tugas Tahunan bagi pekerja di organisasi.

Pandemi virus corona yang terjadi mulai awal tahun 2020 pada dasarnya mempengaruhi permintaan aktivitas publik dan penurunan eksekusi keuangan di negara-negara tertentu di planet ini, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan pandemi virus corona mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Lingkup Besar (PSBB) sejak Walk 2020 sepenuhnya bertujuan membatasi perkembangan individu atau barang dagangan sehingga diharapkan masyarakat tetap berada di rumah jika ada tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kawasan UMKM

ialah diantara kawasan yang berpengaruh besar ketika otoritas publik memberlakukan PSBB, dengan alasan akan mengurangi jumlah pelanggan yang langsung berbelanja, pandemi virus corona menyebabkan sebagian besar UMKM mengalami penurunan gaji karena penurunan dalam daya beli individu (Suryani, 2021) dan (Ihza, 2002). 2020).

Masa pandemi tentunya menjadi penghambat dalam suatu usaha mendatangkan penghasilan yang maksimal, dalam hal ini banyak usaha yang bahkan mengalami kebangkrutan disebabkan pandemi berkepanjangan ini. Perencanaan pajak penghasilan tentunya menjadi diantara alternatif bagi pelaku usaha dalam menghemat pajak penghasilan di masa pandemi, cara ini tidak ilegal, melainkan perencanaan pajak ialah diantara solusi bagi suatu usaha dalam mempertahankan kinerja di masa pandemi.

Dengan menguraikan diatas diketahui bahwasannya peneliti mempunyai ketertarikan melaksanakan riset terkait **“Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada UMKM Plastik Seruni star Kota Batu Jawa Timur”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan permasalahan pada riset berikut yaitu bagaimana menerapkan planning pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan di masa pandemi Covid-19 pada UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu Jawa Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset berikut memiliki tujuan ialah sebagai pengetahuan tentang menerapkan *planning* pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan di masa pandemi Covid-19 pada UMKM Plastik Seruni Star Kota Batu Jawa Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang terdapat pada riset berikut antara lain:

#### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Harapannya riset berikut dan memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dan teori-teori khususnya bidang konsentrasi perpajakan.
- b. Untuk dijadikan sebuah informasi untuk pihak tertentu yang berminat mengadakan riset sejenis.

#### **2) Manfaat praktis**

- a. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi riset berikut bisa dijadikan penambahan koleksi bacaan agar selalu bisa bermanfaat untuk fasilitas referensi dalam peningkatan dan penambahan pengetahuan.
- b. Untuk masyarakat di tempat riset mampu bisa berikan sebuah informasi dan pengalaman bagi masyarakat dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desak Eva Indira Pratiwi. 2012. Perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga). Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijya. Malang
- Debora. Novayanti. 2012. Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Aditya 2020. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 1, No. 2, Maret 2020, pp. 102-111*
- Siti Resmi,. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Siti Chaezahranni, 2016. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, Muhammad 2019 Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada Pt. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal, Volume 4 No 1, Juni 2019 E-ISSN. 2656-4505*